



EKONOMI

KPK: Adik Mantan Kepala BNPB Diduga Pakai Duit Bencana buat Beli Saham Rp30,98 Miliar

Oleh Redaksi · 16 Okt, 20.43 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga mengalir untuk kepentingan pribadi.

Termasuk, pembelian saham senilai Rp30,98 miliar oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Bima Setiawan (BMS), Richard Erlangga (RIC) selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta Syifa Nrika

Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetyawan (GER) dari pihak swasta.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan lima (5) orang sebagai tersangka," ungkap Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers, Jumat, 16 Oktober 2026.

Taufik menjelaskan, DSP merupakan dana yang dicadangkan

pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana dan masuk dalam struktur anggaran BNPB. Penggunaannya dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi.

[Selengkapnya di halaman 15 »](#)

SPORT

Awal Musim NBA: Sorotan Utama untuk Musim 2026/27



NEW YORK - Selama musim panas, keseimbangan kekuatan di NBA telah berubah secara nyata. Hal-hal menarik utama dari musim baru ini dibahas dalam ulasan 1xBet ini.

Akankah New York berhasil mempertahankan gelarnya?

Pada bulan Juni, Knicks mengalahkan San Antonio dengan skor 4-1 di final untuk meraih gelar juara ...

[Selengkapnya di halaman 17 »](#)

NASIONAL

MAKI Desak KPK Tangkap Nusron Wahid: Dua Kali Mangkir, Jangan Ada Panggilan Ketiga!



BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil tindakan tegas terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Nusron Wahid (NW) yang dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan ...

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
LINGKUNGAN	12
Aneka Berita	15

ACEH

Jelang Akhir Masa Tugas, Konjen Jepang Jamu Wali Nanggroe Aceh Bahas Kerja Sama dan Sejarah Sabang



MEDAN - Menjelang berakhirnya masa tugas di Medan, Konsul Jenderal Jepang, H.E. Mr. Furugori Toru, menjamu Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, dalam

jamuan makan siang kehormatan di kediaman resmi Konsul Jenderal Jepang di Medan, Kamis, 15 Oktober 2026.

[Selengkapnya di halaman 16 »](#)

NASIONAL

Nusron Wahid Mangikir Dua Kali, Boyamin: Diduga ke Malaysia



BANDA ACEH - Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/10/2026) memantik tanda tanya.

Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga Nusron Wahid justru bepergian ke luar negeri, dengan Malaysia disebut sebagai tujuan.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

HIBURAN

Profil Yadi Timo, Aktor Senior yang Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun



BANDA ACEH - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktor senior Yadi Timomeninggal dunia pada Jumat (16/10/2026) di usia 66 tahun.

Kepergiannya meninggalkan jejak panjang di dunia seni peran Indonesia, mulai dari panggung teater, layar lebar, hingga berbagai judul sinetron yang menghiasi televisi.

[Selengkapnya di halaman 19 »](#)

LINGKUNGAN

Tambang Menggurita di Aceh, 85 Izin Capai 155 Ribu Hektare



BANDA ACEH - Sebanyak 85 izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam dan batu bara tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan total luas mencapai 155.307,50 hektare.

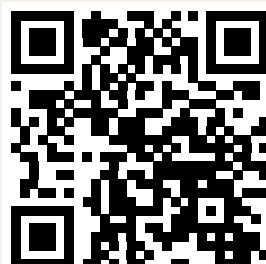
Dikutip dari Mongabay, Jumat (16/10/2026), sebagian besar izin tersebut berstatus eksplorasi, yakni 56 izin dengan luas 117.727,67 hektare.

[Selengkapnya di halaman 13 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

23 BERITA

NASIONAL

Nusron Wahid Mangikir Dua Kali, Boyamin: Diduga ke Malaysia

Oleh Redaksi · 16 Okt, 20.47 WIB



Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/10/2026) memantik tanda tanya.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga Nusron Wahid justru bepergian ke luar negeri, dengan Malaysia disebut sebagai tujuan.

Dugaan itu disampaikan Boyamin berdasarkan keterangan yang dihipunkannya.

Jika informasi tersebut benar, keberadaan Nusron saat dijadwalkan memenuhi panggilan KPK menjadi hal yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Namun, dugaan keberangkatan ke Malaysia tersebut belum terverifikasi secara independen.

Boyamin mengungkapkan, dua hari sebelum jadwal pemanggilan KPK, tepatnya Selasa (13/10/2026), Nusron memimpin rapat internal Kementerian ATR/BPN.

Dalam rapat itu, Nusron disebut memberikan instruksi dan pembagian tugas kepada pejabat eselon I dan eselon II.

Menurut Boyamin, Nusron bahkan sempat menyampaikan rencana untuk fokus memenuhi panggilan lembaga antirasuah tersebut.

“NW saat menutup rapat tersebut menyatakan untuk hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 minta tidak diganggu karena akan fokus penuh panggilan KPK,” ungkap Boyamin dalam keterangannya kepada Monitorindonesia.com, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan itu menjadi sorotan karena Nusron justru tidak hadir memenuhi panggilan KPK pada hari yang telah disebutkan.

Perubahan dari rencana yang disampaikan dalam rapat internal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan ketidakhadirannya.

Boyamin mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang dikumpulkannya, Nusron diduga telah berangkat ke luar negeri pada Kamis pagi (15/10/2026).

Malaysia disebut sebagai negara tujuan, dengan rombongan yang disebut berjumlah kecil dan terbatas.

“NW pada hari Kamis pagi tanggal 15 Oktober 2026 diduga telah bepergian ke luar negeri (diduga Malaysia) dengan rombongan kecil dan terbatas, tidak melibatkan pejabat ATR/BPN,” kata Boyamin.

Meski demikian, informasi mengenai perjalanan tersebut masih berupa dugaan. Belum ada konfirmasi independen yang memastikan Nusron benar-benar berada di Malaysia pada saat panggilan KPK berlangsung.

Boyamin Pertanyakan Izin Presiden

Selain menyoroti dugaan keberangkatan ke luar negeri, Boyamin juga mempertanyakan aspek perizinan perjalanan Nusron sebagai seorang menteri.

Ia menyebut perjalanan seorang menteri ke luar negeri semestinya memperoleh izin Presiden. Namun, Boyamin menegaskan dirinya belum mengetahui apakah izin tersebut telah diberikan.

“Untuk seorang menteri jika bepergian keluar negeri semestinya mendapat izin dari Presiden, namun saya belum mengetahui ada tidaknya izin tersebut,” ujarnya.

Pernyataan Boyamin itu menempatkan dua persoalan yang perlu diperjelas: alasan Nusron tidak memenuhi panggilan KPK dan kepastian mengenai dugaan perjalanan ke luar negeri, termasuk status izinnya.

Boyamin selanjutnya mengajak publik menunggu kehadiran Nusron dalam rapat kabinet yang menurut keterangannya dijadwalkan berlangsung Jumat malam (16/10/2026) dan dipimpin Presiden.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan apakah Nusron akan datang memenuhi panggilan KPK atau justru harus dijemput oleh penyidik.

“Mari kita tunggu NW akan hadir di KPK malam ini atau besok dijemput KPK,” tegas Boyamin.

Pernyataan tersebut merupakan desakan agar keberadaan dan sikap Nusron segera mendapat kejelasan.

NASIONAL

Legislator Golkar Semprot Syed Saddiq: Munafik!

Oleh Redaksi · 16 Okt, 10.16 WIB



BANDA ACEH -Seruan boikot Indonesia yang disampaikan legislator Malaysia, Syed Saddiq, dikecam Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo.

Ia menilai seruan tersebut provokatif dan menantang Malaysia untuk bersikap terbuka mengenai eksploitasi sumber daya alam (SDA) Indonesia serta dugaan aliran dana hasil pengelolaannya ke luar negeri.

“Buka mata dan telinga kalian! Jangan munafik!” tegas Firman kepada wartawan, dikutip Jumat, 16 Oktober 2026.

Firman menilai seruan boikot tersebut tidak mencerminkan hubungan baik Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin lama. Ia meminta anggota parlemen Malaysia memahami sejarah hubungan kedua negara sebelum melontarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh hubungan bilateral.

“Ini tindakan provokatif anggota parlemen yang hanya mencari popularitas murahan. Anggota parlemen harus belajar sejarah bagaimana orang Malaysia belajar di Indonesia waktu Malaysia belum maju,” tegas Politikus Senior Partai Golkar ini.

Firman juga menyoroti keberadaan perusahaan asal Malaysia yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya di Indonesia. Ia mempertanyakan dampak aktivitas perusahaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan, termasuk kerusakan hutan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas investasi asing berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan nasional. Ia juga menyoroti dugaan dana hasil eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang disimpan di luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura.

“Berapa banyak uang, berapa triliun hasil mengeruk kekayaan alam kita, hasil sawit, hasil tambang, hasil hutan, yang disimpan di negara mereka termasuk Singa-

pura? Mereka kaya dari hasil bumi Indonesia, lalu uangnya disimpan di bank-bank Malaysia dan Singapura. Buka mata kalian!” kecamnya.

Firman menegaskan, dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui data dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui aliran dana yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

“Mereka mengeruk kekayaan alam kita, merusak hutan kita, lalu uangnya mereka simpan di negara mereka, termasuk Singapura. Mereka kaya raya dari Indonesia, lalu sekarang mau memboikot dan menekan finansial Indonesia? Ini logika terbalik, ini munafik!” ketusnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik KADIN Indonesia, Firman mendesak pemerintah mengevaluasi perusahaan asing yang bergerak di sektor sumber daya alam. Ia meminta perusahaan yang terbukti melanggar hukum dan merusak lingkungan ditindak tegas, termasuk melalui pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Keuangan menelusuri dugaan aliran dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang disimpan di luar negeri.

“Saya mendesak evaluasi menyeluruh. Nasionalisasi dan cabut izin perusahaan Malaysia di Indonesia yang terkait sumber daya alam yang merusak hutan. Saya juga mendesak PPATK dan Kementerian Keuangan untuk membuka data, berapa besar dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang dilarikan dan disimpan di Malaysia dan Singapura. Biar rakyat tahu,” tegasnya.

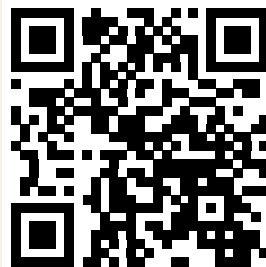
Firman menambahkan, Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

MAKI Desak KPK Tangkap Nusron Wahid: Dua Kali Mangkir, Jangan Ada Panggilan Ketiga!

Oleh Redaksi · 16 Okt, 17.22 WIB



Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil tindakan tegas terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (NW). FOTO/Net.

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil tindakan tegas terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (NW) yang dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Boyamin meminta KPK tidak kembali melayangkan surat panggilan ketiga, melainkan mempertimbangkan penerbitan surat perintah membawa agar Nusron dapat diperiksa penyidik. Menurutnya, ketidakhadiran dua kali harus menjadi dasar bagi KPK untuk mengevaluasi langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau sudah panggilan kedua, ya sudah upaya paksa kalau tidak hadir. Ini kan sudah tidak hadir satu, dua. Nggak ada panggilan ketiga,” kata Boyamin saat berbin-cang dengan

Monitorindonesia.com, Jumat (16/10/2026).

Ia menegaskan, langkah yang dimaksud bukan sekadar mengirim surat panggilan baru, melainkan memerintahkan petugas membawa saksi untuk menjalani pemeriksaan.

“Ini nggak boleh ada surat panggilan ke-3. Adanya surat perintah membawa orangnya. Ya dibawa, dicari di mana pun berada. Dibawa, bahasa orang awamnya ditangkap, tapi bahasanya di KPK beda yakni surat perintah mem-bawa,” ujarnya.

Desakan MAKI itu menempatkan KPK pada tuntutan untuk menjelaskan langkah konkret setelah dua agenda pemeriksaan Nusron tidak terlaksana. Bagi Boyamin, pemeriksaan tersebut penting untuk mendalami perkara yang telah menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta sebagai tersangka.

Pun, Boyamin menilai KPK tidak boleh membiarkan kebutuhan penyidikan terhambat akibat saksi yang berulang kali tidak memenuhi panggilan. Ia meminta

lembaga antirasuah itu menunjuk-kan konsistensi dalam menerapkan kewenangan penyidikan.

“KPK harus berani, kita tantang harus berani dong,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK pernah menerapkan langkah serupa dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin.

Menurut Boyamin, pengalaman tersebut semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menentukan tindakan terhadap saksi yang tidak hadir.

“Jadi KPK sudah punya penga-laman itu dan KPK tinggal berani atau tidak,” katanya.

Boyamin menjelaskan, penerbi-tan surat perintah membawa perlu mempertimbangkan alasan ketida-khadiran saksi. Apabila saksi tidak memberikan alasan atau pemberi-tahuan yang dapat diterima, ia menilai KPK perlu mempertim-bangkan tindakan tersebut sesuai prosedur hukum.

Desakan ini sekaligus menguji konsistensi penegakan hukum KPK: apakah ketidakhadiran saksi

dalam dua agenda pemeriksaan akan ditindaklanjuti dengan lang-kah yang lebih tegas atau kembali berujung pada penjadwalan ulang.

Orang Kepercayaan Nusron Tersangka

Boyamin menilai kebutuhan memeriksa Nusron semakin penting setelah KPK mengungkap bahwa empat tersangka dalam per-kara tersebut disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN itu.

Empat orang tersebut adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Menurut Boyamin, informasi yang disam-paikan KPK mengenai hubungan mereka dengan Nusron menjadi salah satu alasan pemeriksaan terhadap sang menteri perlu dilaku-kan.

“Apalagi KPK sebelumnya sudah mendeklarasikan empat orang tersangka itu adalah tangan kanan atau istilahnya orang keper-cayaan dari NW (Nusron Wahid), kan ditulis begitu dalam ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Andreas Hugo Pareira Sarankan Gibran Mundur: Polemik Ijazah Bisa Berkepanjangan

Oleh Redaksi · 16 Okt, 14.47 WIB



BANDA ACEH — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri di tengah polemik ijazah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Andreas, persoalan tersebut berpotensi berkepanjangan dan terus menjadi sorotan publik jika tidak diselesaikan.

Andreas mengaku awalnya tidak terlalu yakin MK akan membawa perkara terkait ijazah Gibran hingga tahap pembuktian. Namun, ia mengapresiasi langkah MK ketika proses persidangan mema-suki tahap tersebut.

“Saya awalnya tidak terlalu yakin bahwa MK akan sampai pada tahap pembuktian. Tapi ketika masuk pembuktian, saya terus terang, wah, ini luar biasa gitu. Ini hal yang baru. Artinya, MK ini wajah yang baru. Saya salut di situ,” kata Andreas, dikuti-p Jumat (16/10/2026).

Meski mengapresiasi proses di MK, Andreas menilai polemik yang terus berkembang dapat menjadi beban Politik bagi Gibran. Ia pun secara terbuka menyarankan agar putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mundur dari jabatan wakil presiden.

“Kalau menurut saya pribadi, lebih baik kawan ini mundur aja. Gibran ini mundur aja. Karena pasti ditelanjangi di situ. Apa yang terjadi sekarang akan berkepanja-ngan,” tuturnya.

Andreas menilai pengunduran diri merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk merespons polemik tersebut. Namun, ia meragukan Gibran akan mengam-bil langkah itu jika melihat sikap-nya sejauh ini.

Ia juga berpandangan Jokowi tidak menunjukkan keinginan

untuk meminta putranya mengun-durkan diri dari jabatan wakil pre-siden.

Menurut Andreas, persoalan ini bukan hanya menyangkut indi-vidu, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap proses pemilihan pemimpin serta prinsip pemilu yang jujur dan adil.

“Sebenarnya kalau dilihat dari orang per orang semua punya pemikiran yang sama,” katanya.

Andreas turut menyoroti dampak polemik latar belakang pendidikan Gibran terhadap citra Indonesia di mata internasional. Ia menyinggung keterkaitan pembahas-an tersebut dengan pendidikan di Singapura dan Australia, termasuk MDIS.

“Tapi ini kan sebagai bangsa kan dilihat internasional, pendidi-kan Singapura, pendidikan Austra-lia. Terus kita lihat bagaimana wakil presiden, yang lulusan MDIS,” ujar Andreas.

Pernyataan itu menunjukkan kekhawatirannya terhadap bagai-mana persoalan pendidikan peja-bat tinggi negara menjadi perha-tian di luar negeri. Namun, pole-mik dan pernyataan politik terse-but perlu dibedakan dari peneta-pan hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran.

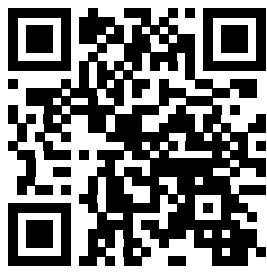
Andreas juga menyinggung kemungkinan penggunaan Hak Angket DPR apabila polemik terse-but berlanjut ke ranah parlemen. Menurut dia, langkah itu berpo-tensi membuka ruang pembahasan yang lebih luas mengenai persoa-lan yang berkembang.

Selain itu, Andreas menying-gung konsep autocratic legalism atau legalisme otokratis. Ia menilai Jokowi telah mempraktikkan konsep tersebut dengan sempurna

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Rumah, 11 Mobil, Uang Rp56 M Disita KPK, Bagaimana Status Hukum Japto?

Oleh Redaksi · 16 Okt, 08.38 WIB



BANDA ACEH – Penyitaan 11 kendaraan bermotor, uang tunai rupiah dan valuta asing, dokumen, serta barang bukti elektronik dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, memunculkan pertanyaan mengenai perkembangan penyidikan dan status hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga kini, Japto diketahui telah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Namun, penyitaan aset dari kediamannya tidak serta-merta menjadikan Japto sebagai tersangka.

Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK), Kurnia Zakaria, menyoroti pentingnya transparansi penanganan perkara, terutama dalam menelusuri asal-usul aset dan dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Kurnia, penyidik KPK harus memastikan seluruh barang

yang disita ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum.

Pengeledahan serta penyitaan tidak boleh berhenti sebagai tindakan pengamanan barang bukti tanpa kejelasan mengenai relevansinya dengan perkara yang sedang diusut.

“Publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penyidikan perkara ini. Ketika penyidik telah melakukan pengeledahan dan menyita sejumlah aset bernilai besar, tentu muncul pertanyaan mengenai hasil penelusuran aliran dana dan keterkaitan aset tersebut dengan perkara yang sedang ditangani,” kata Kurnia saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Kamis (15/10/2026).

Ia menegaskan, penyidik perlu menelusuri asal-usul uang, kepemilikan kendaraan, dokumen transaksi, serta kemungkinan hubungan aset tersebut dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari sektor pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara.

“Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada pengamanan barang bukti. Jika memang

terdapat indikasi aliran dana hasil kejahatan kepada pihak lain, penyidik harus menelusurinya secara serius.”

“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa memandang jabatan, kedudukan, ataupun pangaruhnya,” tambahnya.

Pemeriksaan Berulang, Status Hukum Japto Dipertanyakan

Persoalan yang menjadi perhatian berikutnya adalah status hukum Japto setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara yang dikembangkan KPK.

Kurnia menilai, pemeriksaan berulang tidak otomatis membuktikan seseorang terlibat tindak pidana. Namun, penyidik tetap berkewajiban mengevaluasi seluruh keterangan dan bukti yang ditemukan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan tekanan opini publik. Namun, prinsip tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan petunjuk yang muncul selama penyidikan.”

“Jika alat bukti telah memenuhi persyaratan hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus menindaklanjutinya melalui prosedur yang sah,” lanjut Kurnia.

Dalam perspektif hukum pidana, ujarnya, penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Karena itu, penyitaan aset dan pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pidana.

Meski demikian, KPK perlu menjelaskan perkembangan perkara sejauh yang dapat disampaikan kepada publik, termasuk hasil penelusuran aset dan langkah penyidikan yang telah dilakukan.

“Penjelasan tersebut penting agar tidak muncul spekulasi mengenai penanganan perkara maupun dugaan perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang diperiksa,” tandasnya.

KPK Harus Telusuri Asal-Usul Aset

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Ditahan KPK, Pakai Rompi Oranye

Oleh Redaksi · 16 Okt, 20.37 WIB



Hamenang tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten pada Kamis (15/10/2026). FOTO/Net.

BANDA ACEH - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/10/2026) malam.

Dia tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan dua tangan terborgol saat keluar dari Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Hamenang terlihat menundukkan kepala dengan kedua telapak tangan dirapatkan di depan dada, menyerupai gestur meminta maaf sembari berjalan menuju mobil tahanan KPK. Dia keluar bersama dua orang lainnya.

Sebelumnya, Hamenang tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi setelah terjaring ope-

rasi tangkap tangan (OTT) di Klaten pada Kamis (15/10/2026).

Dalam perkara ini, KPK turut mengamankan uang tunai sekitar Rp1,9 miliar dan sebuah ember atau tong yang diduga digunakan untuk menampung atau menyimpan uang.

KPK telah meningkatkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Kasus ini diduga berkaitan dengan penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta dugaan pemberian uang kepada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan atau audit di Pemkab Klaten.

NASIONAL

Sikapi Putusan MK soal Gibran, PKS Sedang Jihad Lawan Jokowi

Oleh Redaksi · 16 Okt, 14.27 WIB



BANDA ACEH -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai mengambil sikap berbeda dari partai koalisi pemerintahan lainnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat Politik Nurul Fatta menyoroti sikap PKS yang melalui Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Mulyanto, mendesak DPR menindaklanjuti putusan MK secara tuntas dan transparan.

Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan masih adanya residu hubungan Politik yang kurang harmonis antara PKS dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Saya melihatnya tampak masih ada residu hubungan yang kurang harmonis antara PKS dan Jokowi, sejak Pilkada DKI Jakarta hingga dua periode PKS bertahan sebagai oposisi saat Jokowi menjadi presiden,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 16 Oktober 2026.

Ia menafsirkan, PKS saat ini cenderung ingin mempertahankan hubungan politik dengan Presiden Prabowo Subianto, tetapi tidak ingin berada dalam satu barisan dengan keluarga Jokowi, termasuk Gibran yang menjabat sebagai wakil presiden.

“Dalam tafsiran saya, saat ini sebenarnya PKS mau dengan Prabowo saya saja, tetapi tak mau berdampingan dengan keluarga Jokowi, yakni Mas Gibran yang menjabat sebagai Wapres,” ujarnya.

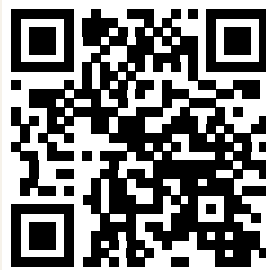
Nurul Fatta juga mengaitkan sikap PKS dengan rekam jejak partai tersebut selama menjadi oposisi pada era pemerintahan Jokowi.

“Seolah-olah bagi PKS, berhadapan dengan Jokowi adalah afdhalul jihad, jihad yang paling utama. Makanya sejak dulu saat menjadi oposisi sudah sering melontarkan kalimat adlin, menyampaikan kebenaran dengan lantang,” tandasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Usut Korupsi di BNPB, KPK Isyaratkan Terapkan Pasal Kerugian Negara dan Hukuman Mati

Oleh Redaksi · 16 Okt, 08.44 WIB



BANDA ACEH -KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan pejabat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lembaga antirasuah mengisyratkan akan mengembangkan dugaan rasuah penyalahgunaan kewenangan dengan menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor atau pasal terkait kerugian keuangan negara.

Demikian ditegaskan Ketua KPK Setyo Budiyanto di sela-sela acara Jelajah Media 2026 di Yogyakarta. Diketahui, KPK telah menjerat lima orang tersangka dalam kasus dugaan rasuah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Dalam temuan awal KPK, diduga terdapat dua klaster perbuatan melawan hukum. Yakni terkait suap (Pasal 11 UU Tipikor) dan konflik kepentingan (pasal 12 huruf (i) UU Tipikor).

“Ini kan proses masih berjalan, gitu ya. jadi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ditemukan ada pengembangan atau mungkin ada informasi baru, ya atau keterlibatan pihak-pihak lain, ya tidak menutup kemungkinan Pasal itu (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) diterapkan,” tegas Setyo, seperti dikutip Holopis.com, Kamis, 15 Oktober 2026.

Dikatakan Setyo saat ini tim penyidik sedang fokus mengusut dugaan suap dan konflik kepentingan yang menjerat lima tersangka. Adapun lima tersangka itu yakni, Kasubdit pengelolaan bantuan dan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK di BNPB Gabriel Purwaka Sigit (GPS), adik Kepala BNPB Letjen Suharyanto bernama Bima Setyawan, tenaga ahli Suharyanto bernama Richard Erlangga serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Setyo memastikan, penyidik akan mendalami banyak aspek ter-

kait dugaan rasuah yang menjerat para tersangka. Tak terkecuali keterlibatan pihak lain. Pun termasuk diduga salah satunya Kepala BNPB Suharyanto. Dalam upaya hukum berjalan, lembaga antirasuah juga menggandeng Polisi Militer TNI (POM TNI).

“Nanti di perjalanan kita melihat tentunya apa semua. Makanya tadi kan relevansi dengan pertanyaan keterlibatan POM untuk pengamanan dan sebagainya itu hanya kami minta untuk mendukung pengamanan dan kelancaran kegiatan penyegelan,” kata Setyo.

Dalam memutuskan pasal sangkan hingga dakwaan, kata Setyo, pihaknya merujuk pada alat bukti yang ada seperti keterangan saksi, bukti dokumen, barang bukti elektronik dan alat bukti yang lainnya. Termasuk, menerapkan pasal dan tuntutan hukuman mati.

UU Tipikor memberikan ruang penerapan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2)

UU Tipikor. Pasal tersebut menyatakan hukuman mati bisa ditetapkan untuk tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Salah satunya tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya.

“Apakah memang penggunaan, penyalahgunaan, penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak khususnya dari badan ini, itu memang posisinya adalah di saat memang bencana. Nah, bencana kan juga ada kategori ya, nanti disesuaikan,” tandas Setyo.

KPK sebelumnya telah menetapkan 5 orang tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB. OTT di lingkungan BNPB terkait dengan dana siap pakai atau DSP kebencanaan periode 2022-2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Jokowi Duga Ada Operasi Politik dan Penumpang Gelap di Balik Isu Ijazahnya dan Gibran

Oleh Redaksi · 16 Okt, 17.08 WIB



BANDA ACEH – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyebut adanya operasi Politik terstruktur serta keberadaan penumpang gelap di balik bergulirnya tuduhan polemik ijazah palsu yang mengarah pada dirinya serta sang putra, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat merespons pertanyaan awak media di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).

“Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik dan penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai,” ujar Jokowi, Jumat (16/10/2026).

Jokowi menilai, manuver dan tekanan politik yang dialamatkan kepada dirinya maupun Gibran merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam panggung politik nasional. Meski demikian, ia menyayangkan pengguliran isu ini karena berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan bangsa yang jauh lebih strategis dan krusial.

Jokowi juga tak menampik bahwa motif di balik operasi politik tersebut diduga kuat bertujuan untuk merusak atau menurunkan reputasi politik (degrade) dirinya dan Wapres Gibran.

Isu mengenai dokumen pendidikan dan ijazah ini sebelumnya kembali menghangat seiring dengan bergulirnya wacana peng-

gunaan Hak Angket oleh sejumlah fraksi di DPR. Menanggapi pergerakan di parlemen tersebut, Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa penggunaan hak angket merupakan hak konstitusional yang sah milik setiap partai politik.

“Ya itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR,” ujar Jokowi.

Diketahui, wacana penggunaan hak angket di parlemen kembali mencuat seiring bergulirnya polemik keabsahan dokumen ijazah penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka yang digunakan saat pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.

Sejumlah kalangan mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan atas pemenuhan syarat administratif tersebut.

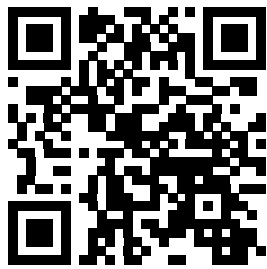
Sesuai aturan perundang-undangan, Hak Angket merupakan instrumen resmi yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas, strategis, serta diduga kuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, wacana Hak Angket DPR tersebut terus menjadi salah satu sorotan utama dalam perkembangan isu politik nasional

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Buka Opsi Jemput Paksa Nusron Wahid Buntut Kembali Mangkir

Oleh Redaksi · 16 Okt, 06.38 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kamis, 15 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik akan mempertimbangkan langkah selanjutnya setelah Nusron kembali tidak hadir dalam pemeriksaan yang merupakan penjadwalan ulang tersebut.

"Setelah kita tunggu yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, kami juga belum mendapatkan konfirmasi alasan ketidakhadiran tersebut, kami juga belum mendapatkan informasi mengapa saudara NW memilih untuk tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan

Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 15 Oktober 2026.

Ia menegaskan, seluruh langkah lanjutan akan menjadi bahan pertimbangan penyidik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

"Tentunya semua akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk langkah-langkah berikutnya sehingga proses penyidikan perkara terkait dengan dugaan penyuaan dan penerimaan-penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga bisa berproses secara positif," tegas Budi.

Saat ditanya apakah langkah tersebut termasuk kemungkinan penjemputan paksa, Budi menyatakan bahwa penyidik masih mempertimbangkan berbagai opsi.

"Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk seperti apa, karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana

konstruksi utuh dari perkara ini, siapa saja pihak-pihak yang kemudian berperan signifikan dalam konstruksi perkara tersebut, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut," jelas Budi.

Budi belum memastikan apakah KPK akan kembali melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Nusron. Ia menegaskan, langkah selanjutnya masih dalam pertimbangan penyidik.

"Ini masih dalam proses pertimbangan oleh penyidik, nanti langkah penyidik seperti apa, pasti kami akan sampaikan updatenya dan kami meyakini sebagai warga negara Indonesia yang baik, terlebih yang bersangkutan juga sebagai pejabat publik tentunya ini juga menjadi sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab untuk kemudian patuh terhadap proses-proses hukum yang dilakukan oleh KPK," pungkas Budi.

Sebelumnya, Nusron dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Namun, saat itu ia menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.

Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Namun, hingga pemeriksaan dijadwalkan berlangsung, Nusron kembali tidak hadir. KPK menyatakan belum menerima konfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya kali ini.

Perkara ini diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa barang bukti elektronik hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Prabowo Panggil Seluruh Menteri ke Istana Bogor Malam Ini

Oleh Redaksi · 16 Okt, 17.28 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memanggil seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke Istana Bogor, Jumat (16/10/2026) malam.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB itu berpotensi menjadi forum konsolidasi pemerintah untuk membahas evaluasi kinerja kabinet dan sejumlah agenda strategis nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membenarkan adanya pemanggilan jajaran pemerintah tersebut. Namun, ia belum mengungkapkan agenda maupun tujuan spesifik pertemuan yang dipimpin Prabowo.

"Benar. Nanti saya cek agendanya ya," kata Syahganda saat memberikan keterangan kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (16/10/2026).

Hingga informasi tersebut disampaikan, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi mengenai materi yang akan dibahas dalam pertemuan malam ini.

Pemanggilan seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan membuka kemungkinan adanya pembahasan lintas kementerian mengenai pelaksanaan program prioritas pemerintahan. Namun, agenda tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Istana.

Sejumlah isu yang berpotensi menjadi perhatian antara lain evaluasi kinerja kementerian dan lembaga, perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden,

serta koordinasi antarinstansi dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Persoalan fiskal dan belanja negara juga dapat menjadi salah satu isu yang relevan untuk dibahas, mengingat pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan disiplin anggaran. Meski demikian, belum ada informasi yang memastikan bahwa persoalan tersebut masuk dalam agenda pertemuan.

Selain itu, forum tersebut berpotensi digunakan untuk menyamakan langkah jajaran kabinet dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan persoalan strategis lainnya. Seluruh kemungkinan itu masih sebatas dugaan berdasarkan cakupan peserta pertemuan, bukan agenda yang telah diumumkan pemerintah.

Pemanggilan seluruh jajaran menteri dan kepala badan menjadi perhatian karena mempertemukan pimpinan kementerian dan lembaga dalam satu forum langsung bersama Presiden.

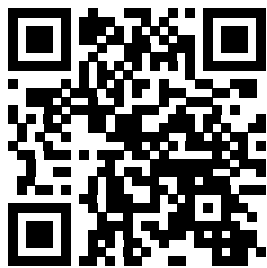
Namun, tanpa penjelasan resmi mengenai materi rapat, belum dapat dipastikan apakah pertemuan tersebut merupakan evaluasi rutin, pengarahan Presiden, konsolidasi kebijakan, atau pembahasan isu tertentu yang membutuhkan keputusan lintas kementerian.

Pemerintah masih perlu mengonfirmasi agenda pertemuan tersebut, termasuk kemungkinan adanya arahan baru dari Prabowo kepada jajaran kabinet.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Didesak Periksa Nusron Beserta Kroni-kroninya

Oleh Redaksi · 16 Okt, 06.44 WIB



BANDA ACEH - DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) bersama gabungan Organ Relawan Prabowo, FORMASI, mahasiswa dan pelajar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sekaligus menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan forum Mukhtar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jombang.

Aksi tersebut mengusung semangat pemberantasan korupsi dan perlawanan terhadap oligarki, massa mendesak KPK menjalankan penegakan hukum secara independen, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Mereka menilai bahwa setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus ditindaklanjuti secara serius berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan

(HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, kami meminta KPK tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga berperan sebagai pelaksana di lapangan. Penelusuran juga perlu mencakup aliran dana, perantara, aktor intelektual, serta pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan apabila terdapat bukti yang mendukung,” kata ketua Aliansi Relawan Prabowo, Andri Sanusi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Selain persoalan pertanahan, massa turut menyoroti dugaan aliran dana dalam forum Mukhtar PBNU. Mereka mendesak KPK memverifikasi informasi yang berkembang, menelusuri sumber dan tujuan transaksi, serta memeriksa pihak-pihak terkait apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang menjadi kewenangan KPK.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Setiap dugaan harus diperiksa secara objektif dan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan Politik yang menjadi tameng dari proses penegakan hukum,” jelas Andri.

Dalam aksi tersebut, FABEM bersama Aliansi Relawan Prabowo menyampaikan enam tuntutan kepada KPK dan aparat penegak hukum.

Pertama, memeriksa Nusron Wahid. Massa mendesak KPK meminta keterangan Nusron Wahid dan mendalami informasi relevan terkait perkara ATR/BPN sesuai kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku.

Kedua, menangkap dan mengadili pihak yang terbukti terlibat. KPK diminta menindak siapa pun yang berdasarkan bukti dan proses hukum terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun afiliasi politik.

Ketiga, membongkar dugaan jaringan mafia tanah dan oligarki. Penyelidikan diharapkan menjangkau pemilik modal, pengem-

bang properti, perantara, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik melawan hukum, sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

Keempat, mengusut berbagai persoalan pertanahan. Massa mendesak penanganan dugaan penyimpangan terkait sertifikat bermasalah, pagar laut Tangerang, tanah terlantar, sertifikat tumpang tindih, kawasan konservasi Tesso Nilo, serta sengketa tanah transmigran sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Kelima, mengusut dugaan aliran dana dalam forum Mukhtar PBNU. Massa meminta KPK menelusuri sumber dana, transaksi, pihak pemberi dan penerima, serta kemungkinan adanya suap atau gratifikasi apabila ditemukan indikasi dan bukti permulaan yang cukup. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dan tidak didasarkan pada asumsi atau kepentingan politik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Ternyata Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Oleh Redaksi · 16 Okt, 06.47 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis, 15 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, terdapat dua aparat sipil negara (ASN) dari BPK yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Salah satunya merupakan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

“Jadi pihak-pihak dari ASN BPK ada dua orang. Benar, salah satunya adalah Kepala Perwakilan Jawa Tengah,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 15 Oktober 2026.

Budi menjelaskan, OTT tersebut berkaitan dengan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi. Klaster pertama terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemberian dari

oknum di lingkungan Pemkab Klaten kepada oknum BPK yang diduga berhubungan dengan proses pemeriksaan atau audit terhadap pemerintah daerah tersebut.

“Nanti masih kami akan dalam permintaan keterangan awal di pemeriksaan beberapa pihak di malam,” ujar Budi.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 20 orang, terdiri dari 19 orang di wilayah Klaten dan satu orang di Jakarta. Pihak-pihak yang diamankan di Klaten saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Klaten, sedangkan satu orang yang diamankan di Jakarta diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

Budi membenarkan bahwa pihak yang diamankan di Jakarta berasal dari BPK.

Selain mengamankan 20 orang, tim KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Penghitungan uang tersebut masih berlangsung.

KPK dijadwalkan melakukan gelar perkara atau ekspose pada Kamis malam untuk menentukan perkembangan penanganan kasus tersebut, termasuk konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak yang diamankan.

NASIONAL

Terungkap di Persidangan, Ternyata Andi Azwan Akui Tak Pernah Lihat Ijazah Asli Jokowi

Oleh Redaksi · 16 Okt, 17.19 WIB



Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) sekaligus Militer Gibran Nusantara, Andi Azwan. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) sekaligus Militer Gibran Nusantara, Andi Azwan, mengaku tidak pernah melihat, memegang, maupun memeriksa secara langsung ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengakuan ini terungkap saat Andi Azwan bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah

dengan terdakwa Tifauzia Tyasuma (Dokter Tifa) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam persidangan, Andi Azwan mengungkapkan bahwa pengetahuannya mengenai ijazah Jokowi hanya bersumber dari pemberitaan media, dokumen fotokopi, serta unggahan di media sosial, bukan dari pemeriksaan langsung terhadap dokumen asli.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Soroti Status Wantimpres Jusuf Hamka, Muslim Arbi: Kasus Tol CMNP Cawang-Pluit kok Mandek di Kejagung?

Oleh Redaksi · 16 Okt, 10.35 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi mempertanyakan penanganan dugaan korupsi perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dia menilai status pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka yang telah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disinyalir menjadi penyebabnya.

“Saya menjadi heran pihak Kejaksaan Agung itu kenapa bisa mandek gitu lho. Nah, apakah karena memang (terduga) pelakunya itu Wantimpres? Itu menjadi pertanyaan, kan gitu,” kata Muslim se usai Diskusi Publik “Membongkar Mafia Oligarki di Jalan Tol Era Jokowi” di Sofyan Hotel Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi dugaan korupsi pembengkakan biaya proyek yang mencapai Rp2,3 triliun, perpanjangan konsesi hingga 2060, dan proses penunjukan langsung dalam pengembangan jalan tol layang (elevated).

Muslim mempertanyakan lambannya penanganan kasus tersebut.

Menurut dia, sejumlah persoalan terkait perpanjangan konsesi dan proses pengadaan proyek tol itu perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Artinya bahwa kok di negara ini ada yang lebih tinggi dari di atas hukum? Iya, kan? Artinya kerugian negara sudah jelas, ya kan? Kemudian tanpa lelang sudah jelas, kemudian terjadi perpanjangan, itu jelas itu,” ujarnya.

Dia juga mendorong Kejagung dalam menangani perkara tersebut.

Muslim bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum itu apabila dinilai tidak mampu menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang disorot.

Muslim menilai Kejagung perlu segera melakukan pembenahan agar dugaan penyimpangan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Menurut Muslim, dugaan penyimpangan dalam proyek tol tersebut perlu ditindaklanjuti, karena berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara dan rakyat.

Dia mempertanyakan alasan belum adanya perkembangan penanganan yang dinilainya memadai, meski persoalan itu disebut telah menjadi perhatian sejak lama.

“Jadi, jangan sampai Jaksa Agung takut sama Wantimpres” kata Muslim.

NASIONAL

PDIP Terus Tekan Gibran karena Punya Luka Dalam ke Jokowi

Oleh Redaksi · 16 Okt, 14.32 WIB



BANDA ACEH -Sebagai partai yang mengambil posisi di luar pagar koalisi pemerintahan, PDIP Perjuangan terus mendorong tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat Politik Nurul Fatta menilai, sejumlah kader PDIP secara terbuka mendorong agar putusan MK tersebut ditindaklanjuti. Di antaranya, Dedy Sitorus yang menyuarakan perlunya langkah lanjutan hingga Komarudin Watubun yang meminta Gibran mundur dari jabatannya.

“PDIP posisinya yang jelas dari luar pagar, menekan keras terus-menerus. Sebagai partai non-koalisi, kader-kadernya mendorong tindak lanjut putusan MK, seperti Dedy Sitorus. Pak Komarudin bahkan meminta Gibran mundur dari jabatannya,” kata

Nurul Fatta kepada R MOL, Jumat, 16 Oktober 2026.

Menurutnya, sikap tersebut tidak terlepas dari hubungan Politik PDIP dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ayahanda Gibran, yang mengalami keretakan mendalam.

“Kita tahu, PDIP punya luka yang dalam sama Pak Jokowi, yang hampir susah disembuhkan. Makanya wajar sikapnya sangat bergairah sekali untuk menindaklanjuti putusan MK,” ujarnya.

Meski demikian, Nurul menilai arah sikap resmi PDIP masih bergantung pada keputusan pimpinan partai, termasuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

“Meskipun semua masih menunggu perintah petinggi-petinggi partainya, seperti Puan dan Hasto,” tandasnya.

NASIONAL

Soal Isu Hak Angket DPR Usut Ijazah Gibran, Jokowi: Itu Hak Konstitusional Partai

Oleh Redaksi · 16 Okt, 14.38 WIB



BANDA ACEH – Wacana penggunaan Hak Angket oleh DPR guna mengusut polemik ijazah penyetaraan milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ditanggapi santai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menegaskan, pengajuan hak angket merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap partai Politik dan fraksi di parlemen.

“Ya itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).

Diketahui, wacana penggunaan hak angket di parlemen kembali mencuat seiring bergulirnya polemik keabsahan dokumen ijazah penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka yang digunakan saat pendaftaran seba-

gai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.

Sejumlah kalangan mendesak DPR untuk mengulirkan hak angket guna melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan atas pemenuhan syarat administratif tersebut.

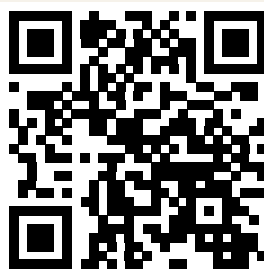
Sesuai aturan perundang-undangan, Hak Angket merupakan instrumen resmi yang dimiliki DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas, strategis, serta diduga kuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, wacana Hak Angket DPR tersebut terus menjadi salah satu sorotan utama dalam perkembangan isu politik nasional

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Ahmad Khozinudin: MK Nyatakan Gibran Tak Penuhi Syarat Jadi Wapres, Harus Dimakzulkan

Oleh Redaksi · 16 Okt, 06.55 WIB



BANDA ACEH - Pengacara pelapor surat keterangan (suket) Gibran, Ahmad Khozinudin, mendesak partai Politik di DPR untuk mengaktifkan pasal pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Dia menjelaskan langkah ini didorong menyusul celah hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai mengindikasikan adanya syarat pencalonan yang tidak terpenuhi.

Menurut Ahmad Khozinudin, meskipun masa pencalonan telah melewati batasan 20 Oktober 2024, persoalan mengenai syarat formil seorang Wapres tetap dapat dipersoalkan melalui mekanisme hak menyatakan pendapat di DPR.

"Maka kami dorong ketua partai politik agar menginstruksikan fraksi-fraksi di DPR untuk mengaktifkan pasal pemakzulan,"

ujar Khozinudin dalam program Interupsi bertajuk "Ijazah Gibran dan Pasal Selundupan Disorot" di iNews, Kamis (15/10/2026).

Dia menyoroti sejumlah catatan dari MK, mulai dari polemik ijazah, ketiadaan dokumen penyetaraan yang sah, hingga persoalan aturan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang diduga sebagai pasal penyelundupan.

"Yang menjadi dasar penentuan penyetaraan ternyata adalah Permendikbud bukan dari PKPU. Karena apa? Karena rezim penyetaraan pendidikan itu harus tunduk pada Permendikbud, bukan PKPU yang belakangan PKPU nomor 19 tahun 2023 ini diduga ya, ini penyelundupan karena ada Pasal 18 ayat 3 yang sebelumnya tidak dikenal dan ini seperti jalan tol untuk meluluskan Gibran bisa

nyalon sebagai wakil presiden," katanya.

"Kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan MK itu mengindikasikan bahwa seorang wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat dan oleh karenanya harus dimakzulkan," ucap dia.

Dia upaya hukum dan konstitusional tersebut tidak lagi memerlukan proses penyelidikan panjang karena bukti-bukti dan pemanggilan pihak terkait telah tuntas melalui proses peradilan MK sebelumnya.

"Justru putusan MK yang sudah ada penyelidikan oleh MK, pihak-pihak sudah dipanggil, bukti-bukti sudah dikumpulkan, tinggal di-follow-up untuk menyatakan pendapat pada dua hal. Pertama, DPR menyatakan pendapat apakah wakil presiden terbukti telah tidak lagi memenuhi syarat atau yang

kedua masih memenuhi syarat," uapc dia.

Oleh karena itu, Khozinudin bersama tim hukum terus melakukan konsolidasi serta safari politik ke sejumlah pimpinan partai politik di parlemen untuk mendorong pengaktifan hak menyatakan pendapat guna menindaklanjuti status hukum wakil presiden.

"Sementara kami sedang berkonsolidasi dengan pimpinan-pimpinan partai dan mereka akan menjadwalkan kapan akan bisa memenuhi undangan untuk klarifikasi dan kemudian memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan apa yang tadi baru diterima apa yang menjadi pandangan kami dalam bentuk legal opini yang kami serahkan kepada Partai Golkar, Partai Gerindra dan juga Partai PDIP," pungkasnya

NASIONAL

Bupati Klaten Bersama 8 Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Oleh Redaksi · 16 Okt, 08.53 WIB



BANDA ACEH - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (16/10) pagi. Hamenang dibawa bersama delapan orang lainnya ke Jakarta usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/9).

Mereka tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 07.03 WIB. Hamenang datang didampingi penyidik menggunakan mobil berkelir hitam.

Hamenang tampak mengenakan topi dan kacamata hitam, serta masker berwarna putih untuk menutupi sebagian wajahnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengamini bahwa Hamenang bersama delapan orang lainnya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK.

"Yang dibawa ke KPK sembilan

orang," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (16/10).

KPK mengamankan total 20 orang dalam OTT di Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis kemarin. OTT itu diduga berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," ujarnya.

Selain mengamankan Bupati, tim KPK turut mengamankan ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta. Mereka akan menjalani didalami keterangannya berkaitan dengan tangkap tangan tersebut.

KPK memiliki waktu 1x24 jam sebagaimana tertuang dalam KUHP untuk menentukan status hukum atas pihak-pihak yang diamankan tersebut.

NASIONAL

KPK Buka Peluang Jemput Paksa Nusron Wahid

Oleh Redaksi · 16 Okt, 10.44 WIB



BANDA ACEH - - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan upaya jemput paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Jemput paksa dipertimbangkan setelah Nusron dua kali tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mempertimbangkan langkah tersebut.

"Masih dipertimbangkan oleh penyidik setelah dua kali tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh KPK," kata Budi, Jumat (16/10/2026).

Sebelumnya, KPK menjadwalkan ulang

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Empat tersangka disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka yakni mantan Bupati Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin dan Muhammad Fakhry (MF).

Sementara itu, empat tersangka lain yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Bupati Klaten Tiba di KPK usai Kena OTT, Petugas Bawa Tong Diduga buat Tampung Uang

Oleh Redaksi · 16 Okt, 08.31 WIB



BANDA ACEH - -Bupati Klaten-Hamenang Wajar Ismoyo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (16/10/2026) pagi, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026). KPK turut menyita sebuah ember atau tong yang diduga digunakan untuk menampung uang.

Hamenang terlihat mengenakan masker, jaket dan topi berwarna hitam.

Hamenang menjadi orang pertama yang tiba di Gedung Merah Putih KPK. Sembilan orang lainnya turut dibawa dari Klaten ke Jakarta, termasuk Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Petugas juga terlihat membopong sebuah ember

plastik berwarna biru bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK".

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, ember atau tong tersebut diduga digunakan Hamenang untuk menampung atau menyimpan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Untuk barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, di antaranya ada uang tunai senilai sekitar Rp1,9 miliar," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

"Kemudian tadi teman-teman juga melihat ada tong atau ember yang kemudian juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, bahwa ember atau tong tersebut diduga yang digunakan bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," sambungnya.

Dia menjelaskan, dari total 19 orang yang diamankan di wilayah Klaten, sembilan orang dibawa ke Jakarta menggunakan kereta pada Kamis (15/10/2026) malam. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (16/10/2026) pagi.

Selain sembilan orang tersebut, satu orang lainnya yang diamankan di Jakarta turut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dengan demikian, total ada 10 orang yang saat ini menjalani pemeriksaan di Jakarta.

KPK juga telah meningkatkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah melakukan ekspose pada Kamis malam.

"Tadi malam untuk perkara ini sudah dilakukan ekspose dan diputuskan kegiatan penyelidikan di

Klaten naik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Terkait penetapan tersangka, KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut melalui konferensi pers yang direncanakan berlangsung Jumat sore.

Adapun perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. KPK menduga penerimaan itu terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, serta penerimaan lainnya dari dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, KPK menduga terdapat pemberian uang oleh bupati kepada oknum di BPK terkait pemeriksaan atau audit di Pemerintah Kabupaten Klaten

NASIONAL

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Oleh Redaksi · 16 Okt, 06.50 WIB



BANDA ACEH - Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI) menyatakan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa 13 Oktober 2026.

Melalui pernyataan sikap "Menjaga Amanah Kemanusiaan: Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Bencana dan Perkuat Integritas Penanggulangan Bencana", APKI mendorong pengusutan menyeluruh dan pembenahan tata kelola dana bencana.

"Korupsi dana bencana apabila terbukti merupakan pengkhianatan terhadap amanah kemanusiaan," kata Convener APKI, M. Ali Yusuf, dikutip Kamis 15 Oktober 2026.

Sementara itu, Convener APKI Rahmawati Husein mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap BNPB dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

Sedangkan Convener APKI Puji Pujiono menyoroti persoalan struktural dan budaya organisasi, termasuk sistem insentif, pengawasan, serta relasi kekuasaan yang berpotensi memicu penyimpangan berulang.

Bambang Suherman dari Perhimpunan Filantropi Indonesia menegaskan bahwa kepercayaan menjadi modal utama filantropi dan solidaritas kemanusiaan.

Karena itu, setiap rupiah dana bencana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Romi Ardiansyah dari Humanitarian Forum Indonesia (HFI) melanjutkan bahwa prinsip kemanusiaan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup integritas pengelolaan sumber daya yang harus benar-benar berpihak kepada masyarakat terdampak.

M. Avianto Amri dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menekan pentingnya akuntabilitas pengadaan dan penggunaan Dana Siap Pakai.

Wildhan Dewayana dari Forum Zakat menekankan kejujuran dan transparansi. Indira Hapsari dari Lokanusa menegaskan hak masyarakat untuk mengawasi bantuan.

Terakhir, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Pengelola Zakat (POROZ) Bukhori Muslim menekankan akuntabilitas dan penegakan hukum yang adil.

KPK telah menetapkan lima orang dugaan korupsi di BNPB, yakni Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bima Setyawan selaku tenaga ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Suharyanto, serta dua orang swasta yaitu Gery P dan Syifa N G.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

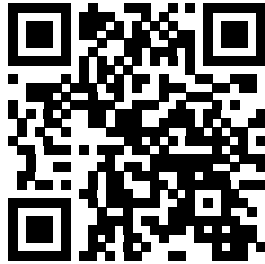
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Terjaring OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismo Punya Harta Rp 5,9 Miliar

Oleh Redaksi · 16 Okt, 08.50 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/10). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Hamenang sempat dibawa ke Mapolresta Klaten sekitar pukul 09.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan awal. Setelah itu, ia dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan sejumlah kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dugaan perkara itu mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD). KPK juga mengungkap dugaan pemberian uang dari bupati kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan proses audit.

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10) malam.

Dalam OTT tersebut, tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 1

miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan pemberian suap dari Bupati Klaten kepada oknum BPK di Jawa Tengah.

Harta Kekayaan Hamenang Wajar Ismoyo Capai Rp 5,9 Miliar

Hamenang Wajar Ismoyo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 5.983.361.557. Total harta kekayaan itu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada 26 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Politikus PDI Perjuangan itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak lima bidang yang tersebar di Jogjakarta dan Klaten. Aset properti Hamenang senilai Rp 2.595.000.000.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Klaten itu juga melaporkan memiliki aset berupa alat transportasi, di antaranya mobil Mazda RX 8 tahun 2006, mobil Honda Civic tahun 2013, mobil Toyota minibus tahun 2013, motor Yamaha 2DP tahun 2017, motor Yamaha Fazio tahun 2022, dan motor Kawasaki Ninja tahun 2011. Harta alat bergerak milik Hamenang itu tercatat sejumlah Rp 565.000.000.

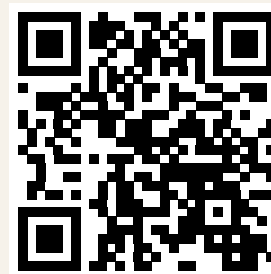
Hamenang juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 263.500.000. Ia juga mengklaim memiliki kas dan setara kas Rp 1.210.861.557, serta harta lainnya Rp 1.349.000.000.

Sehingga, jika ditotalkan harta Hamenang Wajar Ismoyo seluruhnya mencapai Rp 5.983.361.557

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

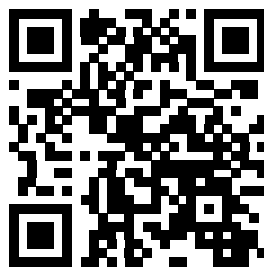
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

5 BERITA

LINGKUNGAN

Gubernur Aceh Imbau Warga Waspada Kabut Asap Karhutla, Kualitas Udara Menurun

Oleh Redaksi · 16 Okt, 20.05 WIB



Gubernur Aceh Muzakir Manaf. FOTO/Net.

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah Aceh sejak 13 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 16 Oktober 2026, kabut asap tersebut menyebabkan penurunan kualitas udara, terutama akibat keberadaan partikel halus PM2,5.

Paparan partikel halus tersebut berpotensi meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, hingga gangguan kardiovaskular.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Muzakir Manaf mengimbau seluruh bupati dan wali kota serta pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah mitigasi

guna mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan keselamatan pengguna jalan.

Masyarakat juga diminta menghentikan pembakaran terbuka, baik untuk pembukaan lahan, pembakaran sisa pertanian, maupun pembakaran sampah yang dapat memperparah kabut asap.

Dalam hal keselamatan berlalu lintas, pengguna jalan diimbau menyalakan lampu kendaraan, mengurangi kecepatan, dan berhenti di tempat aman apabila jarak pandang membahayakan perjalanan.

Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika tingkat polusi udara tinggi. Perlindungan khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan penyakit penyerta atau komorbid.

Bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang mampu menyaring partikel halus PM2,5 juga dianjurkan.

Untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan, masyarakat diminta menutup jendela, pintu, dan lubang ventilasi ketika kepekatan kabut asap meningkat. Langkah tersebut perlu diterapkan di rumah, tempat kerja, sekolah, maupun sarana ibadah.

Selain itu, masyarakat diimbau menerapkan pola hidup sehat dengan memperbanyak konsumsi air putih dan menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Warga yang mengalami sesak napas, batuk terus-menerus, nyeri dada, iritasi mata berat, pusing, atau keluhan kesehatan lainnya diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten dan kota diminta menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan selama 24 jam, termasuk rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, klinik, dan pos kesehatan, untuk mendeteksi serta menangani dampak kabut asap.

Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan kembali desk dan posko penanganan karhutla di setiap kabupaten/kota. Upaya tersebut perlu disertai penguatan edukasi kepada masyarakat, penyusunan rencana kontingensi, serta koordinasi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait.

Masyarakat dapat memantau perkembangan peringatan karhutla dan informasi kualitas udara melalui kanal resmi BMKG, yakni situs www.bmkg.go.id atau aplikasi InfoBMKG.[]

LINGKUNGAN

Dampak Kabut Asap, Pemko Banda Aceh Siagakan Puskesmas 24 Jam dan Terapkan Sekolah Daring

Oleh Redaksi · 16 Okt, 21.34 WIB



Ilustrasi Kabut Asap yang disebabkan dari Kebakaran Hutan dan Lahan. FOTO/Net. [] Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

BANDA ACEH - Sebaran kabut asap yang terpantau di Kota Banda Aceh di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera menjadi perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat, Pemko menyiapkan langkah penanganan, mulai dari kesiapan pelayanan kesehatan hingga penerapan pembelajaran daring bagi siswa.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada Jumat sore (16/10).

Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar pemerintah dapat merespons perkembangan kondisi dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Di sektor kesehatan, seluruh puskesmas di Banda Aceh disiagakan selama 24 jam.

Dinas Kesehatan mengoordinasikan kesiapan tersebut agar masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, terutama keluhan pernapasan akibat paparan asap, dapat memperoleh penanganan dengan cepat.

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan kebij-

kan pembelajaran daring bagi sekolah-sekolah di kota Banda Aceh, mulai dari jenjang PUAD/TK, SD, dan SMP Negeri, melalui surat edaran Wali Kota.

Kebijakan ini menjadi langkah antisipasi untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap di tengah kondisi kualitas udara yang perlu diwaspadai.

Pemko mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Warga juga disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar, serta lebih berhati-hati saat berkendara apabila jarak pandang menurun.

Masyarakat yang mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan yang memburuk diimbau segera mencari pertolongan medis.

Melalui langkah antisipasi ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia dan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, tetap menjadi perhatian utama.***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

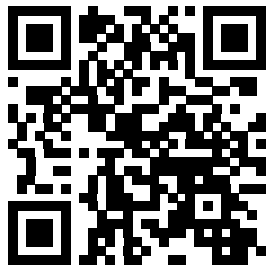
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

Dinkes Sabang Bagikan 5.000 Masker untuk Lindungi Warga dari Paparan Asap

Oleh Redaksi · 16 Okt, 13.18 WIB



Berdasarkan informasi INWCCA Aceh pada Kamis (15/10/2026), indeks kualitas udara di Kota Sabang tercatat sebesar 152, yang masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Sementara itu, berdasarkan data kualitas udara dari IQAir, indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) di Kota Sabang tercatat sebesar 64 pada Kamis (15/10/2026) pukul 16.00 WIB dan 61 pada Jumat (16/10/2026) pukul 07.00 WIB. Kedua angka tersebut masuk kategori sedang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Rinaldi Syahputra, mengatakan pembagian masker merupakan upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan kesehatan akibat paparan asap.

“Ini merupakan upaya preventif untuk melindungi masyarakat. Kami melihat kabut asap semakin tebal sehingga perlu mengambil langkah antisipasi agar masyarakat dapat mengurangi paparan asap

saat beraktivitas di luar rumah,” kata Rinaldi, Jumat (16/10/2026).

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 4.000 masker didistribusikan di empat titik, yakni Simpang Garuda, Simpang Pujasera, Simpang Tugu Cengkeh, dan kawasan Sabang Fair. Sebanyak 1.000 masker tambahan dibagikan di Simpang Garuda karena tingginya aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah yang melintas di kawasan tersebut. Dengan demikian, total masker yang dibagikan mencapai 5.000 buah.

“Pembagian masker ini tidak hanya dilakukan di titik-titik keramaian, tetapi juga akan kami lanjutkan melalui seluruh puskesmas di Kota Sabang. Selain itu, kami juga akan menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak dan ibu hamil, melalui kegiatan posyandu serta kunjungan dari rumah ke rumah dengan melibatkan bidan desa dan kader kesehatan,” tambah Rinaldi.

Kegiatan tersebut turut didukung oleh Dinas Perhubungan

Kota Sabang dan petugas kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk memastikan pembagian masker berlangsung tertib, terutama di persimpangan yang ramai aktivitas masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Mayuni, mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan guna mengurangi risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tengah kondisi kabut asap. Salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan menjaga daya tahan tubuh.

“Kami akan terus mengupayakan langkah preventif melalui pembagian masker dan penguatan pelayanan puskesmas,” ujar Mayuni.

Ia menjelaskan bahwa pembagian masker akan terus dilakukan secara bertahap kepada masyarakat Kota Sabang. Sejalan dengan upaya tersebut, masyarakat juga diimbau menjaga kesehatan

dengan mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta mengonsumsi buah-buahan.

“Kami mengimbau masyarakat, terutama kelompok rentan, agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama kabut asap berlangsung. Anak-anak dan ibu hamil sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan,” tambahnya.

Melalui pembagian masker dan penguatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, Dinkes dan KB Kota Sabang berharap upaya pencegahan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap.[]

Catatan redaksi: Terdapat perbedaan angka indeks kualitas udara yang cukup besar antara INWCCA Aceh (152) dan IQAir (64 dan 61).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

LINGKUNGAN

Tambang Menggurita di Aceh, 85 Izin Capai 155 Ribu Hektare

Oleh Redaksi · 16 Okt, 11.37 WIB



BANDA ACEH – Sebanyak 85 izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam dan batu bara tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan total luas mencapai 155.307,50 hektare.

Dikutip dari Mongabay, Jumat (16/10/2026), sebagian besar izin tersebut berstatus eksplorasi, yakni 56 izin dengan luas 117.727,67 hektare. Sementara itu, sebanyak 29 izin lainnya telah memasuki tahap operasi produksi dengan luas 37.579,83 hektare.

Data yang dipublikasikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh tersebut mencantumkan nama perusahaan, tahap izin, nomor izin, tanggal penerbitan dan berakhirnya izin, jenis komoditas, luas konsesi, serta kabupaten/kota lokasi pertambangan.

Aceh Jaya menjadi daerah dengan luas IUP terbesar, mencapai 48.324,30 hektare. Berikutnya, Aceh Barat dengan 30.926 hektare, Aceh Singkil 22.049 hektare, Nagan Raya 20.648,48 hektare, Aceh Selatan 13.980,17 hektare, dan Aceh Tengah 5.577 hektare.

Selanjutnya, Pidie memiliki luas IUP 4.217,60 hektare, Aceh Barat Daya 3.264 hektare, Aceh Besar 3.134,63 hektare, Kota Subulussalam 1.955 hektare, Aceh Tamiang 1.016,12 hektare, dan Gayo Lues 215,20 hektare.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marwan Nusuf, menjelaskan bahwa penerbitan IUP dilakukan melalui serangkaian tahapan yang ketat. Seluruh proses berlangsung secara elektronik melalui sistem perizinan, bukan secara manual.

“Tidak ada tatap muka antara pemohon dengan petugas dalam proses penerbitan izin. Tanggal pengajuan, pemeriksaan, hingga penandatanganan izin semuanya tercatat secara elektronik,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).

Ia mengatakan, sebelum izin diterbitkan, DPMPTSP terlebih dahulu memverifikasi kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen yang diajukan. Selain memeriksa administrasi perusahaan, instansinya juga memastikan dokumen pendukung, termasuk

keaslian tanda tangan dan berbagai persyaratan lainnya, telah sesuai dengan ketentuan.

Dalam proses tersebut, DPMPTSP mewajibkan setiap pengusul izin tambang memperoleh rekomendasi dari pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten atau kota.

“Selain itu, terdapat pula rekomendasi teknis dari instansi terkait, seperti sektor energi dan sumber daya mineral, untuk memastikan lokasi yang diajukan berada dalam kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.”

Marwan menjelaskan, kewenangan Pemerintah Aceh dalam menerbitkan izin pertambangan merupakan bagian dari kekhususan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba) pada dasarnya menarik kewenangan perizinan ke pemerintah pusat, Aceh tetap memiliki kewenangan tertentu berdasarkan aturan khusus tersebut.”

Menurut Marwan, jika perusahaan pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk persyaratan teknis dari dinas terkait, DPMPTSP Aceh tidak memiliki alasan untuk menunda atau menolak izin tersebut.

“Kalau semua persyaratan yang telah diwajibkan telah dipenuhi dan kami tidak menolak izin tersebut, maka kami bisa digugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN),” jelasnya.

Tekanan terhadap Kelestarian Hutan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menilai puluhan IUP tersebut berpotensi memberikan tekanan serius terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.

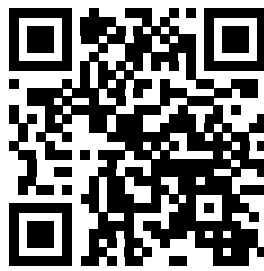
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, Afifuddin, mengatakan persoalan pertambangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi, penerimaan daerah, dan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

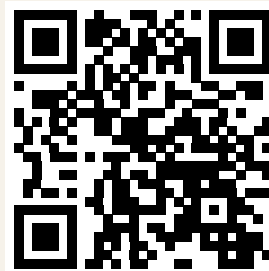
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

Kabut Asap Selimuti Banda Aceh, Ketua DPRK Minta Wali Kota Pertimbangkan Sekolah Daring, Rumah Sakit Harus Siaga

Oleh Redaksi · 16 Okt, 12.50 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, mempertimbangkan penerapan pembelajaran daring atau sekolah online untuk sementara waktu, menyusul kabut asap yang mulai menyelimuti ibu kota Provinsi Aceh ini.

Langkah itu untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak di tengah memburuknya kondisi udara.

Katanya, wali kota juga dapat mempertimbangkan pengaturan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah antisipasi.

Diketahui, kabut asap mulai menyelimuti langit Banda Aceh secara perlahan sejak Kamis (15/10/2026). Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama anak-anak dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Irwansyah menegaskan bahwa kesehatan warga harus menjadi

prioritas pemerintah. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil langkah antisipatif sebelum dampak kabut asap semakin meluas.

Politisi muda PKS tersebut juga meminta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh terus memantau perkembangan kabut asap dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat.

Menurutnya, informasi yang akurat dan diperbarui secara berkala sangat penting agar warga mengetahui perkembangan kondisi udara serta dapat mengambil langkah perlindungan yang diperlukan.

Irwansyah mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap.

Ia juga meminta pemerintah memantau ketersediaan masker di masyarakat serta mengantisipasi kemungkinan adanya pedagang

yang menaikkan harga secara tidak wajar di tengah situasi tersebut.

Menurutnya, kondisi darurat seperti kabut asap berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memainkan harga barang yang dibutuhkan masyarakat.

Irwansyah turut meminta rumah sakit milik pemerintah maupun swasta meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pasien yang terdampak kabut asap, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Ia menekankan, meskipun belum ada laporan pasien yang terdampak kabut asap, fasilitas kesehatan harus tetap bersiap menghadapi kemungkinan kondisi yang lebih buruk.

“Rumah sakit harus sudah siaga jika sewaktu-waktu ada pasien yang terdampak kabut asap ini, misalnya karena ISPA, terutama

anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kabut asap dilaporkan mulai memasuki wilayah Aceh secara bertahap. Dua hari sebelumnya, kabut asap mulai menyelimuti wilayah Aceh Timur, kemudian bergerak hingga mencapai Banda Aceh pada Kamis (15/10/2026).

Menurut Irwansyah, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kabut asap yang terjadi bukan sekadar persoalan lokal.

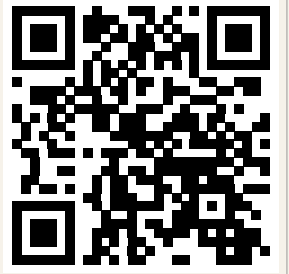
Ia meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah pencegahan sesuai tugas masing-masing.

“Warga kita imbau menggunakan masker, rumah sakit harus siaga, DLHK3 terus memantau perkembangan kabut asap, dan wali kota dapat mempertimbangkan sekolah daring maupun pengaturan jam kerja PNS,” kata Irwansyah.***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

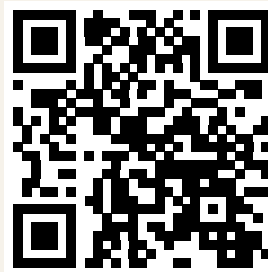
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

11 BERITA

EKONOMI

KPK: Adik Mantan Kepala BNPB Diduga Pakai Duit Bencana buat Beli Saham Rp30,98 Miliar

Oleh Redaksi · 16 Okt, 20.43 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga mengalir untuk kepentingan pribadi.

Termasuk, pembelian saham senilai Rp30,98 miliar oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Bima Setiawan (BMS), Richard Erlangga (RIC) selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER) dari pihak swasta.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan lima (5) orang sebagai tersangka," ungkap Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein,

saat konferensi pers, Jumat, 16 Oktober 2026.

Taufik menjelaskan, DSP merupakan dana yang dicadangkan pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana dan masuk dalam struktur anggaran BNPB. Penggunaannya dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.

Dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP, BNPB sebelumnya telah menentukan sejumlah penyedia melalui dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) dengan mekanisme penunjukan langsung agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.

Namun, KPK menduga mekanisme tersebut disalahgunakan untuk kepentingan sejumlah pihak di lingkungan BNPB.

"Namun demikian, dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Sehingga atas penggunaan DSP berbasis RKK yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak di BNPB," ujarnya.

Dalam klaster pertama, KPK menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa selama periode 2024–2026. Sejumlah perusahaan yang bermitra dengan BNPB melalui mekanisme penunjukan langsung diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan.

Nilai pengadaan yang diduga terkait perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar. Rinciannya, Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan sekitar Rp50 miliar pada 2026.

KPK menduga dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya melalui pembelian saham PT

Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

"Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar atau setara Rp30,98 miliar," kata Taufik.

Sementara itu, dalam klaster kedua, KPK mengungkap dugaan praktik suap terkait pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP BNPB.

Richard Erlangga diduga meminta fee kepada penyedia agar memperoleh paket pengadaan pada 2026. Salah satu perusahaan yang disebut dalam konstruksi perkara tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras (TLS), yang dipimpin Gery Prasetiawan.

KPK menduga Richard menerima uang melalui perantara dari Gery selama periode Januari hingga September 2026 dengan total mencapai Rp2,38 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

INTERNASIONAL

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Oleh Redaksi · 16 Okt, 17.04 WIB



BANDA ACEH -Sebanyak lima orang tewas dan 16 lainnya terluka dalam serangan rudal kelompok Houthi yang menasar kawasan Istana Presiden al-Maashiq di Kota Aden, Yaman.

Kompleks istana tersebut merupakan pusat kekuasaan pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi.

Menteri Informasi Yaman, Moammar al-Eryani pada Jumat, 16 Oktober 2026 mengatakan Houthi meluncurkan lima rudal ke arah istana.

Pemerintah Yaman memastikan perdana menteri dan sejumlah pejabat lainnya selamat. Namun, dua pengawal perdana menteri dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.

Asap tebal terlihat membubung dari kawasan sekitar istana, sementara sejumlah ledakan dilaporkan terjadi di dekat kompleks pemerintahan itu.

Jurnalis Al Jazeera, Yousef Mawry, yang melaporkan dari Sanaa, ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi, menyebut serangan terhadap pusat pemerintahan tersebut sebagai kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini merupakan indikasi bahwa eskalasi akan semakin intensif antara kedua belah pihak," kata Mawry.

Dia juga mengungkapkan kekhawatiran meningkatnya risiko perang saudara berskala penuh di Yaman yang dapat menyeret kekuatan regional lainnya, selain Arab Saudi.

Serangan di Aden berlangsung ketika pertempuran antara Houthi, kelompok bersenjata yang juga dikenal sebagai Ansar Allah, dan pasukan pendukung pemerintah Yaman semakin intensif di Taiz.

Pasukan yang bersekutu dengan pemerintah mengklaim tengah memukul mundur serangan Houthi di Bandara Dhubab, wilayah pesisir Provinsi Taiz.

Di sisi lain, koalisi pimpinan Arab Saudi menuduh Houthi memperoleh rudal balistik dari negara-negara lain di kawasan.

Juru bicara koalisi, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, menyatakan serangan Houthi telah menewaskan 17 orang dan melukai lebih dari 300 orang, di tengah serangkaian serangan yang turut menasar bandara, fasilitas minyak, dan pelabuhan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

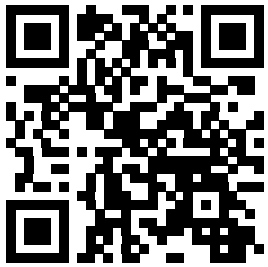
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Jelang Akhir Masa Tugas, Konjen Jepang Jamu Wali Nanggroe Aceh Bahas Kerja Sama dan Sejarah Sabang

Oleh Redaksi · 16 Okt, 19.35 WIB



Konsul Jenderal Jepang, H.E. Mr. Furugori Toru, menjamu Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, dalam jamuan makan siang kehormatan di kediaman resmi Konsul Jenderal Jepang di Medan, Kamis, 15 Oktober 2026. FOTO/Net.

MEDAN - Menjelang berakhirnya masa tugas di Medan, Consul Jenderal Jepang, H.E. Mr. Furugori Toru, menjamu Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, dalam jamuan makan siang kehormatan di kediaman resmi Consul Jenderal Jepang di Medan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas hubungan Jepang dan Aceh, keberlanjutan sejumlah program kerja sama yang telah berjalan, serta peluang pengembangan kolaborasi di bidang pendidikan, kebencanaan, kemaritiman, energi, investasi, hingga pelestarian peninggalan sejarah Jepang di Sabang.

Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan jamuan tersebut berlangsung menjelang berakhirnya masa tugas Furugori Toru di Medan yang dijadwalkan pada pekan depan. Furugori mulai menjabat sebagai Consul Jenderal Jepang di Medan pada Juni 2025, menggantikan Takonai Susumu.

Dalam pertemuan itu, Furugori memaparkan sejumlah program kerja sama dan bantuan Pemerintah Jepang untuk Aceh, terutama sejak bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada 26 Desember 2004.

Berdasarkan paparan Konsulat Jenderal Jepang, pada masa tanggap darurat tsunami, Jepang mengerahkan lebih dari 2.000 personel dan menyalurkan sekitar 403 ton bantuan kemanusiaan.

Dukungan tersebut berlanjut pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi melalui berbagai program, mulai dari pemulihan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan sarana evakuasi, pengendalian banjir, hingga pemulihan sektor perikanan dan fasilitas masyarakat.

Di sektor infrastruktur dan ekonomi, kerja sama yang dipaparkan antara lain pembangunan PLTA Peusangan Tahap II dengan nilai proyek sekitar 13,62 miliar yen serta pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang.

Selain itu, terdapat kegiatan survei eksplorasi minyak dan gas bumi di sekitar Lhokseumawe yang melibatkan JOGMEC, JAPEX, dan Universitas Padjadjaran.

Melalui skema bantuan hibah Grassroots, Jepang juga mendukung pembangunan Pusat Edukasi Tsunami Aceh pada 2023 senilai sekitar USD 50.031. Pada 2025, Jepang turut memberikan bantuan alat berat untuk pemulihan bencana di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya senilai sekitar USD 452.357.

Kerja sama pengurangan risiko bencana melalui JICA turut melibatkan Kota Banda Aceh dan Kota Higashimatsushima, Jepang, terutama dalam pendidikan kebencanaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Pada Agustus 2026, kedua pemerintah kota juga telah menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang pemulihan dan ketahanan terhadap bencana.

Menanggapi paparan tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan

apresiasi atas kontribusi Pemerintah dan masyarakat Jepang dalam mendukung pemulihan dan pembangunan Aceh.

Menurut Wali Nanggroe, hubungan yang telah terbangun selama lebih dari dua dekade sejak tsunami 2004 merupakan modal penting untuk memperkuat persahabatan sekaligus memperluas kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Ia juga mendorong agar hubungan yang telah terjalin dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah di Aceh terus dikembangkan.

Wali Nanggroe menyinggung peluang kolaborasi yang melibatkan Universitas Syiah Kuala, Universitas Teuku Umar, serta pemerintah daerah di kawasan Aceh Barat, termasuk Meulaboh.

"Pengalaman dari berbagai kerja sama yang telah berjalan dinilai dapat menjadi referensi untuk menjajaki program serupa di kabupaten dan kota lainnya ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

EDUKASI

Unpas Geger! Belasan Mahasiswi Diduga Dilecehkan 6 Oknum Dosen

Oleh Redaksi · 16 Okt, 10.38 WIB



BANDA ACEH – Universitas Pasundan (Unpas) digegerkan dengan kasus pelecehan seksual yang dialami belasan mahasiswi. Aksi tidak senonoh itu diduga dilakukan enam oknum dosen.

Ketua Umum BEM FH Unpas, Dhean Salvez mengungkapkan, hingga saat ini posko aduan BEM telah menerima setidaknya 13 laporan dari mahasiswi lintas semester yang mengaku menjadi korban. Dari penelusuran awal, teridentifikasi sekitar empat hingga enam oknum dosen yang diduga kuat sebagai terduga pelaku.

"Sejauh ini kami telah menerima 13 laporan dari korban yang merupakan mahasiswi lintas semester. Dari laporan yang masuk, teridentifikasi ada sekitar empat sampai enam oknum terduga pelaku," ujar Dhean Salvez, Jumat (16/10/2026).

Terkait skandal pelecehan seksual tersebut, kata dia, mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan utama kepada pimpinan kampus. Tuntutan tersebut di antaranya mencakup pendampingan psikologis serta hukum gratis bagi korban, pengusutan tuntas dan sanksi tegas bagi para pelaku,

hingga rekonstruksi total Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan FH maupun Universitas Pasundan.

"Kami memberikan tenggat waktu (deadline) 7x24 jam bagi pihak rektorat untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan tersebut," katanya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Rektor I Unpas, Carton, membenarkan adanya aduan tersebut dan menegaskan komitmen jajaran rektorat untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, objektif, dan transparan.

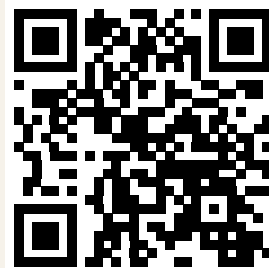
"Pihak kampus berkomitmen penuh menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan transparan. Kami segera membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan berbagai unsur, termasuk perwakilan mahasiswa," kata Carton.

Dia mengungkapkan, berdasarkan identifikasi awal, bentuk pelecehan yang dilaporkan meliputi tindakan verbal serta sentuhan fisik yang tidak pantas. Saat ini, setidaknya dua oknum dosen telah teridentifikasi awal untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh tim investigasi khusus

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

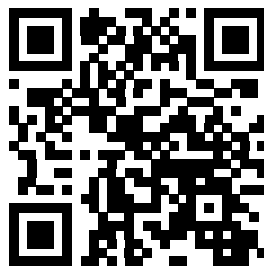
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



SPORT

Awal Musim NBA: Sorotan Utama untuk Musim 2026/27

Oleh Redaksi · 16 Okt, 19.00 WIB



NBA Preview.

NEW YORK - Selama musim panas, keseimbangan kekuatan di NBA telah berubah secara nyata. Hal-hal menarik utama dari musim baru ini dibahas dalam ulasan 1xBet ini.

Akankah New York berhasil mempertahankan gelarnya?

Pada bulan Juni, Knicks mengalahkan San Antonio dengan skor 4-1 di final untuk meraih gelar juara pertama mereka sejak 1973. Jalen Brunson, yang mencetak 45 poin dalam pertandingan penentu, sudah dianggap sebagai salah satu bintang terbesar dalam sejarah klub. Namun, mempertahankan gelar juara jauh lebih sulit daripada memenangkannya: juara terakhir yang berhasil melakukannya adalah Golden State Warriors pada tahun 2017 dan 2018.

Tim asuhan Mike Brown ini masih mempertahankan sebagian besar pemain intinya, dengan hanya kehilangan center cadangan Mitchell Robinson di antara para pemain kuncinya. Lawan-lawannya kini akan mempersiap-

kan diri dengan lebih cermat untuk menghadapi sang juara bertahan, sehingga banyak hal akan bergantung pada kedalaman skuad dan kondisi fisik para pemain Knicks.

Akankah Philadelphia dan Miami mampu bersaing memperebutkan gelar juara?

Miami dan Philadelphia muncul sebagai pemenang terbesar di Wilayah Timur pada musim jeda ini. Heat berhasil mendatangkan Giannis Antetokounmpo dan Klay Thompson, dengan harapan dapat membentuk duet penyerang yang tangguh. Tim ini memiliki potensi yang besar, meskipun kedalaman skuad di posisi perimeter yang lebih baik tentu akan sangat membantu.

Philadelphia berhasil merakit skuad yang bahkan lebih dipenuhi bintang. LeBron James bergabung dengan Tyrese Maxey dan Joel Embiid, sementara pemain muda VJ Edgecombe diharapkan dapat memberikan semangat tambahan. Jika tim ini dapat terhindar dari

cedera dan cepat membangun chemistry, Sixers berpotensi melaju jauh di babak playoff.

Apa saja yang akan berubah bagi Lakers seiring dimulainya era Dončić?

Dengan kepergian LeBron, Luka Dončić kini menjadi pemimpin tak terbantahkan Lakers untuk pertama kalinya. Serangan tim akan berpusat pada visi permainannya di lapangan, bersama rekan setim utama seperti Austin Reaves dan center Walker Kessler. Hampir tidak ada ruang lagi dalam anggaran gaji untuk penembak-penembak kelas atas, sehingga banyak hal akan bergantung pada pemain asal Slovenia tersebut.

Akankah Oklahoma City dan San Antonio tetap memimpin di Wilayah Barat?

Victor Wembanyama membantu Spurs mencapai Final NBA pada upaya pertama mereka, di mana mereka akhirnya kalah dari Knicks. Namun, di Final Wilayah Barat, San Antonio berhasil

menyingkirkan juara bertahan, Oklahoma City. Spurs mempertahankan skuad mereka tanpa perubahan, sementara Thunder melepas Luguentz Dort, Aaron Wiggins, dan Isaiah Joe.

Minnesota, dengan bergabungnya LaMelo Ball ke dalam tim; Portland, dengan Ja Morant yang blak-blakan; dan Houston, yang berharap dapat menyambut kembali point guard berpengalaman Fred VanVleet, semuanya siap menantang para favorit.

Klub mana yang akan menjadi yang pertama melakukan perombakan besar-besaran terhadap skuadnya di Wilayah Timur?

Beberapa tim mungkin akan melakukan pertukaran pemain setelah awal musim yang mengecewakan. Indiana Hoosiers menanti kembalinya Tyrese Haliburton dengan performa terbaik, sementara Cleveland Cavaliers mengandalkan James Harden yang baru saja memperpanjang ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co

LIFESTYLE

Gubernur Kalteng Ngomong ‘Bercerai Kita Kawin Lagi’, DPR: Pejabat Harus Punya Empati!

Oleh Redaksi · 16 Okt, 10.31 WIB



BANDA ACEH - - Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengingatkan seluruh pejabat publik agar selalu menunjukkan empati dan sensitivitas saat berkomunikasi mengenai penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Peringatan ini disampaikan Irawan sekaligus merespons viralnya perkataan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menuai sorotan luas di media sosial.

Agustiar Sabran sebelumnya memplesetkan peribahasa 'bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi' saat bicara penanganan karhutla.

"Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla," ujar Irawan, dikutip Jumat (16/10/2026).

Irawan menilai, bencana karhutla telah memberikan dampak negatif yang sangat parah bagi

kehidupan sosial, kesehatan, serta perekonomian masyarakat lokal. Oleh karena itu, dia menilai, setiap pernyataan yang keluar dari pejabat publik, harus mempertimbangkan kondisi psikologis warga yang sedang berjuang menghadapi kepungan asap.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, alih-alih melontarkan candaan yang tidak sensitif, seorang pimpinan daerah sepatutnya hadir untuk memberikan ketenangan serta membangun optimisme masyarakat.

"Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam," katanya.

Sebelumnya, cuplikan video Agustiar Sabran saat membahas penanganan karhutla beredar luas di platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, Agustiar memaparkan bahwa hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia.

Namun, dia menyisipkan seloroh berupa plesetan peribahasa 'bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi' yang dinilai mencederai empati kepada masyarakat terdampak

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

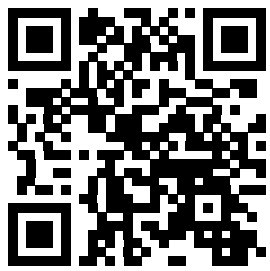
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OTOMOTIF

Mobil Listrik Tesla Roadster Bisa Terbang, Akselerasi 0-96 Km/Jam Hanya 0,81 Detik

Oleh Redaksi · 16 Okt, 17.14 WIB



BANDA ACEH - Tesla Roadster terbaru mencuri perhatian lewat demonstrasi ekstrem yang memperlihatkan mobil sport listrik tersebut bermanuver di udara hingga diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 96 km/jam hanya dalam 0,81 detik. Kemampuan ini dikaitkan dengan teknologi pendorong hasil kolaborasi Tesla dengan SpaceX.

Dalam demonstrasi peluncurannya, Roadster diperlihatkan melaju menaiki tanjakan vertikal yang kemudian berubah menjadi lintasan horizontal. Mobil tersebut lalu melesat ke udara, melakukan manuver berputar, dan mendarat secara terkontrol.

Tesla juga memperlihatkan aksi Roadster berputar di atas deretan mobil lainnya sebelum kembali mendarat dengan mulus. Meski terlihat spektakuler, kendaraan yang dipamerkan masih berstatus konsep dan produksi baru dijadwalkan dimulai pada 2028.

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah penggunaan 10 pendorong gas dingin atau cold-gas thrusters. Menurut Tesla,

perangkat tersebut menggunakan udara bertekanan tinggi yang disimpan dalam dua tangki berkapasitas masing-masing 600 liter.

CEO Tesla Elon Musk menyebutkan sistem pendorong tersebut menggunakan udara atmosfer biasa sehingga dapat diisi ulang saat mobil dikendarai. Teknologi ini diklaim memungkinkan Roadster melakukan manuver di udara, kemampuan yang tidak lazim ditemukan pada mobil sport produksi massal.

<https://www.youtube.com/watch?v=d2jH2x1HWxE>

Selain itu, Tesla menyebut kipas di bagian bawah mobil mampu menghasilkan gaya tekan ke bawah hingga 2G ketika kendaraan diam. Sistem tersebut dirancang untuk menghasilkan gaya tekan yang membantu kendaraan mempertahankan traksi.

Namun, Tesla belum memaparkan secara terperinci bagaimana seluruh teknologi tersebut akan diterapkan pada kendaraan produksi. Sebab itu, kemampuan yang diperlihatkan dalam demonstrasi perlu dibedakan dari spesifikasi

final yang nantinya tersedia bagi konsumen.

Akselerasi 0-96 Km/Jam dalam 0,81 Detik

Tak hanya kemampuan bermanuver di udara, Tesla mengklaim Roadster terbaru mampu berakselerasi dari 0 hingga 60 mph dalam 0,81 detik. Angka tersebut setara dengan sekitar 96 km/jam.

Klaim akselerasi di bawah satu detik ini menjadi salah satu aspek paling menonjol dari Roadster terbaru. Tesla mengaitkan kemampuan tersebut dengan teknologi pendorong yang dikembangkan bersama SpaceX, tetapi belum mengungkapkan rincian metode pengujian maupun kontribusi setiap sistem terhadap akselerasi.

Perusahaan juga belum mengumumkan spesifikasi utama, seperti tenaga maksimum motor listrik, konfigurasi penggerak, kapasitas baterai, dan jarak tempuh. Informasi mengenai kapasitas produksi serta pasar pertama yang akan menerima kendaraan ini juga belum tersedia.

Dari sisi desain, Roadster terbaru tampil lebih bersudut dibandingkan model yang diperkenalkan pada 2017. Mobil ini juga disebut mengusung teknologi steer-by-wire, brake-by-wire, dan throttle-by-wire untuk mengendalikan kemudi, pengereman, dan akselerasi secara elektronik.

Sementara itu, spoiler belakang diklaim mampu menyesuaikan gaya tekan ke bawah atau downforce secara dinamis sesuai kondisi kendaraan. Sistem pengeremannya disebut menggunakan Brembo Sensify.

Produksi Tesla Roadster Mulai 2028

Tesla menyebut Roadster terbaru akan tersedia dalam tiga varian, yakni Performance, Thrust, dan Rocket. Berdasarkan informasi perusahaan, varian Performance memerlukan deposit 50.000 dolar AS, sedangkan varian Thrust yang ditujukan untuk kemampuan akselerasi di bawah satu detik dipatok sebesar 250.000 dolar AS.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

566 Orang dari 12 Kecamatan Ikuti MTQ ke-XXXVIII Aceh Barat

Oleh Aceh Barat · 16 Okt, 14.54 WIB



Panitia pelaksana menyambut kedatangan kafilah dari 12 kecamatan Melalui prosesi pengalungan bunga, FOTO/ist

MEULABOH – Sebanyak 566 peserta dan oficial dari 12 kecamatan tiba di Meulaboh untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXVIII tingkat Kabupaten Aceh Barat tahun 2026.

Kedatangan para kafilah disambut panitia pelaksana melalui prosesi pengalungan bunga di halaman Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, Jumat (16/10/2026) pagi.

Ketua Panitia MTQ yang juga Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat, Dr. Husensah, S.Pd., M.Pd., mengatakan seluruh kafilah akan ditempatkan di 24 rumah warga. Setiap kecamatan mendapat dua rumah, masing-masing untuk kafilah laki-laki dan perempuan.

"Jumlah keseluruhan mencapai 566 orang, terdiri dari peserta dan oficial," ujar Husensah.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pawai ta'aruf pada Jumat sore. Pawai dimulai dari halaman Kantor Bupati Aceh Barat, melintasi Jalan Gajah Mada dan Jalan Imam Bonjol, kemudian berakhir di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

Pembukaan MTQ ke-XXXVIII dijadwalkan berlangsung Jumat malam dan direncanakan dibuka langsung oleh Bupati Aceh Barat.

Husensah berharap dewan hakim dapat memberikan penilaian secara profesional sehingga melahirkan peserta terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah pada MTQ tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya.

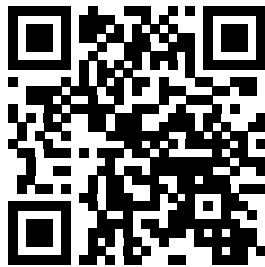
"Target kita, Aceh Barat mampu masuk lima besar pada ajang tingkat provinsi," tutupnya.[]

Editor : Biro Meulaboh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



HIBURAN

Profil Yadi Timo, Aktor Senior yang Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun

Oleh Redaksi · 16 Okt, 14.43 WIB



BANDA ACEH – Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktor senior Yadi Timo meninggal dunia pada Jumat (16/10/2026) di usia 66 tahun.

Kepergiannya meninggalkan jejak panjang di dunia seni peran Indonesia, mulai dari panggung teater, layar lebar, hingga berbagai judul sinetron yang menghiasi televisi.

Nama Yadi Timo mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama, tetapi wajahnya cukup akrab bagi penonton film dan sinetron Indonesia. Ia dikenal sebagai aktor karakter yang mampu menghidupkan beragam tokoh, mulai dari sosok antagonis yang licik hingga figur ayah dengan kisah hidup penuh pergulatan.

Kabar meninggalnya Yadi Timo disampaikan penulis skenario Joko Nugroho melalui akun Instagram. Sutradara Hanung Bramantyo juga menyampaikan belasungkawa dan mengenang Yadi sebagai guru sekaligus senior yang berjasa pada awal perjalanan kariernya.

Lantas, seperti apa profil dan perjalanan karier Yadi Timo semasa hidupnya? Berikut ulasannya.

Profil Yadi Timo

Yadi Timo merupakan aktor Indonesia yang memiliki nama lengkap Yadi Djoerica Marton Timo. Ia lahir di Bogor pada 12 Februari 1960. Berdasarkan tanggal kelahiran dan wafatnya, Yadi meninggal dunia pada usia 66 tahun.

Yadi menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan Teater. Latar belakang pendidikan tersebut menjadi salah satu bekal dalam perjalanan panjangnya menekuni seni peran.

Berikut biodata singkat Yadi Timo:

- Samarinda Tak Bakar Lahan
- * Nama panggung: Yadi Timo
- * Nama lengkap: Yadi Djoerica Marton Timo
- * Nama lain: Yadi Mulyadi
- * Tempat, tanggal lahir: Bogor, 12 Februari 1960
- * Usia: 66 tahun

* Profesi: Aktor film dan televisi

* Pendidikan: Institut Kesenian Jakarta, jurusan Teater

* Tanggal meninggal dunia: 16 Oktober 2026

Informasi mengenai identitas dan latar belakang pendidikannya tercantum dalam sejumlah profil serta pemberitaan tentang sang aktor.

Mengawali Perjalanan dari Dunia Seni Peran

Sebelum dikenal luas melalui berbagai tayangan televisi dan film, Yadi Timo memiliki latar belakang pendidikan teater. Pengalaman di bidang seni pertunjukan menjadi bagian dari perjalanan yang membawanya menekuni dunia akting secara profesional.

Kariernya di televisi telah berlangsung sejak era 1990-an. Salah satu sinetron yang turut memperkenalkan namanya kepada penonton adalah Air Mata Ibu.

Seiring berjalannya waktu, Yadi semakin sering muncul dalam berbagai produksi sinetron. Ia dikenal sebagai aktor pendukung yang

mampu memberikan karakter tersendiri pada cerita, meski bukan selalu menjadi pemeran utama.

Kehadirannya di layar kaca juga memperlihatkan kemampuannya memainkan berbagai tipe karakter. Yadi tidak hanya dikenal melalui tokoh antagonis, tetapi juga pernah memerankan figur ayah dan karakter dengan persoalan kehidupan yang dekat dengan cerita sehari-hari.

Dikenal sebagai Mastur, Penculik dalam Petualangan Sherina

Salah satu peran Yadi Timo yang paling mudah dikenali penonton adalah Mastur dalam film Petualangan Sherina.

Film yang dirilis pada 2000 tersebut menjadi salah satu film musikal anak Indonesia yang populer lintas generasi. Dalam ceritanya, Yadi memerankan salah satu anggota kelompok penculik yang terlibat dalam petualangan Sherina dan Sadam.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

PERIKANAN

DKP Aceh Dorong Pelaku Usaha Perikanan Manfaatkan Peluang Emas Misi Dagang Aceh–Jawa Timur 2026

Oleh Hamdani · 16 Okt, 19.45 WIB



DKP Aceh mendorong pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan Aceh memanfaatkan Misi Dagang Aceh–Jawa Timur 2026 sebagai peluang emas untuk memperluas akses pasar.

BANDA ACEH - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mendorong pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Aceh untuk memanfaatkan Misi Dagang Pemerintah Aceh dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagai peluang strategis memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing produk, dan membuka akses pasar antardaerah.

Melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Abdus Syakur pada Jumat (16/10/2026), DKP Aceh mengajak para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dan mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026, di Amel Hotel Convention Hall, Banda Aceh.

Misi dagang tersebut menjadi kesempatan penting bagi pelaku usaha Aceh untuk memperkenalkan potensi komoditas unggulan, membangun kemitraan bisnis, serta menjajaki peluang transaksi dengan pelaku usaha dari Jawa Timur. Khusus sektor kelautan dan perikanan, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemasaran produk perikanan Aceh, baik dalam bentuk bahan baku maupun produk olahan bernilai tambah.

DKP Aceh turut mengambil bagian dalam persiapan kegiatan dengan mengusulkan belasan pengusaha sektor kelautan dan perikanan untuk berpartisipasi. Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah sesuai kebutuhan dan perkembangan persiapan pelaksanaan misi dagang.

Abdus Syakur menilai, misi dagang ini perlu dimanfaatkan sebagai kesempatan emas bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Karena itu, pelaku

usaha diharapkan dapat mempersiapkan produk unggulan, informasi kapasitas produksi, kualitas dan kontinuitas pasokan, serta peluang kerja sama yang dapat ditawarkan kepada calon mitra bisnis.

Potensi kelautan dan perikanan Aceh memiliki peluang untuk dikembangkan melalui perluasan akses pasar dan penguatan kerja sama perdagangan. Namun, peluang tersebut perlu didukung kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pasar, menjaga mutu produk, serta membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan.

Persiapan Misi Dagang Aceh–Jawa Timur 2026 telah dibahas dalam rapat pra-misi dagang yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah kedua provinsi, pelaku usaha, serta asosiasi pengusaha dari Aceh dan Jawa Timur.

Pembahasan mencakup koordinasi dan finalisasi peserta, komoditas yang akan diperdagangkan, penampilan produk, serta berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan.

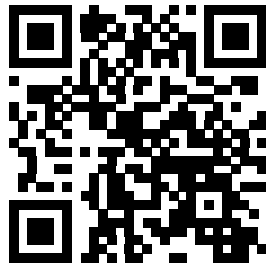
Melalui keikutsertaan dalam misi dagang ini, DKP Aceh berharap pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan mampu memanfaatkan peluang pertemuan bisnis secara optimal, menjalin kemitraan yang produktif, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan Aceh.

Upaya tersebut sejalan dengan dorongan Pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan, memperluas jangkauan pemasaran produk daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha dan perdagangan antardaerah.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

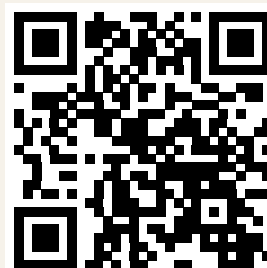
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



HIBURAN

Berlliana Lovell Somasi Amat Jelangkuy Imbas Pelecehan Seksual saat Live TikTok

Oleh Redaksi · 16 Okt, 10.21 WIB



BANDA ACEH – Selebgram Berlliana Lovell mengambil langkah tegas setelah mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual secara verbal saat LIVE TikTok bersama kreator konten Amat Jelangkuy.

Tak sekadar menyampaikan keberatan, Berlliana Lovell kini resmi melayangkan somasi kepada Amat Jelangkuy melalui tim kuasa hukumnya.

Somasi tersebut menjadi peringatan bagi pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan itikad baik dan menyelesaikan persoalan yang membuat Berlliana merasa direndahkan sebagai perempuan. Jika tidak ada respons sesuai tuntutan, tim kuasa hukum membuka kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Di balik langkah tersebut, Berlliana mengaku masih merasakan dampak psikologis akibat kejadian yang dialaminya. Dia bahkan membandingkan pengalaman tersebut dengan berbagai hujatan yang selama ini diterimanya selama berkarier di dunia hiburan.

“Kalau dibilang dari 2019 aku di entertain, pasti banyak hujatan atau apa pun itu, tapi aku masih bisa terima karena kan biasanya mereka komen dan lain-lain, aku masih bisa punya pilihan untuk membaca atau tidak, meladeni atau tidak,” kata Berlliana dalam konferensi pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Nah kalau ini tuh kayak secara langsung gitu lho, jadi rasanya tuh benar-benar beda banget dan gue kena mental sih, jujur,” sambungnya.

Berlliana Lovell Beri Tenggat 3x24 Jam kepada Amat Jelangkuy

Kuasa hukum Berlliana, Sapta Simon, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi resmi kepada pemilik akun terkait dengan batas waktu 3x24 jam.

Dalam tenggat tersebut, pihak Amat diharapkan menunjukkan itikad baik dengan menemui Berlliana secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf.

Jika tidak, tim kuasa hukum siap mengambil langkah lanjutan.

“Apabila tidak, nah kalau tidak ya jelas, kami harus akan melakukan upaya hukum lanjutan. Seperti apa? Dengan langkah melaporkan polisi, hak kepidanaannya, ada hak perdatanya klien kami juga,” tegas Sapta Simon.

Dia menjelaskan, pihaknya mempertimbangkan jalur pidana maupun perdata. Menurut Sapta, kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan bagi Berlliana secara psikologis, tetapi juga berdampak pada aktivitas profesionalnya.

“Karena klien kami ini tadi menjelaskan trauma dia. Dia jadi trauma untuk live lagi gitu lho. Ini kan berarti ada kerugian materiil juga yang dialami oleh klien kami,” sambungnya.

Pihak Berlliana berharap somasi tersebut mendapat respons yang baik. Namun, apabila tidak ada penyelesaian dalam tenggat yang diberikan, mereka menyatakan

siap melanjutkan persoalan sesuai jalur hukum yang tersedia.

Berlliana Batal Hadiri Pekerjaan akibat Tekanan Psikis

Dampak kejadian tersebut, menurut pihak manajemen, juga mulai mengganggu pekerjaan Berlliana. Nanda Persada selaku perwakilan manajemen menyebut tekanan psikis yang dialami Berlliana membuatnya terpaksa membatalkan agenda profesional.

Nanda menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dianggap selesai hanya dengan permintaan maaf melalui media sosial. Menurutnya, dampak yang dialami Berlliana perlu menjadi perhatian pihak yang bersangkutan.

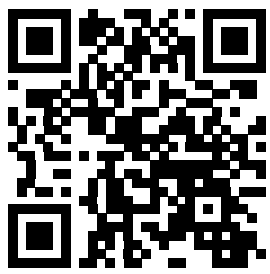
“Hari ini sebenarnya Berlliana punya kegiatan pekerjaan yang akhirnya dia tidak bisa datang ke acara itu. Karena apa? Ya karena tekanan psikis,” ujar Nanda Persada.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia